

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, DPPKAD Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, menghimpun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perimbangan keuangan, akuntansi, perbendaharaan dan kas daerah, aset, pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis DPPKAD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra DPPKAD;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun .

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

DPPKAD Kab. Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bupati dalam merumuskan, menghimpun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi pendapatan, anggaran, perimbangan keuangan, akuntansi, perbendaharaan dan kas daerah, aset, pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;

- 2) Penyusunan program kerja bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Pelaksanaan program bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

E. Kepegawaian.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012, maka jumlah Pegawai pada DPPKAD Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 86 (DELAPAN PULUH ENAM) orang yang terdiri 83 (delapan puluh tiga) orang PNS dan 3 orang Non PNS.

Adapun secara umum kondisi PNS yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin :

- Laki-laki : 50 Orang
- Perempuan : 36 Orang

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :

- Golongan I : 3 orang
- Golongan II : 22 orang
- Golongan III : 52 orang
- Golongan IV : 6 orang
- Non PNS : 3 orang

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan :

- SD : - orang
- SMP : 4 orang
- SMA : 22 orang

- D3/Sarmud : 14 orang
- D4 : 1 orang
- S1 : 39 orang
- S2 : 3 orang

d. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan :

- Eselon IIb : 1 orang
- Eselon IIIa : 1 orang
- Eselon III b : 5 orang
- Eselon IV b : 16 orang
- Fungsional Umum : 60 orang
- Non PNS : 3 orang

Adapun data Pegawai selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

F. Aset yang dikelola.

Untuk mendukung operasional kegiatan DPPKAD dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun kepada masyarakat Purbalingga, maka DPPKAD didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai berupa aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang pengelolaannya dipercayakan kepada DPPKAD.

Secara garis besar aset dimaksud terdiri dari :

1) Tanah (KIB A)	senilai	Rp. 693.528.000,-
2) Peralatan dan Mesin	senilai	Rp. 4.661.172.981.-
3) Bangunan Gedung	senilai	Rp. 2.609.372.050,-
4) Instalasi dan Jaringan	senilai	Rp. 332.736.500,-
5) Aset Tetap Lainnya	senilai	Rp. -
Jumlah		Rp. 8.296.809.531,-

Adapun daftar aset berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) secara lengkap sebagaimana Lampiran 2. (Data sementara dari SKPD, untuk data SKPKD menyusul)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset daerah bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yaitu :

1. Peningkatan Kualitas pelayanan Umum ;
2. Peningkatan Pendapatan Daerah ;
3. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara efektif dan efisien.

Sasaran-sasaran dimaksud perlu diprioritaskan dalam rangka mendukung tercapainya visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu **mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Dinamis** Guna mencapai sasaran dimaksud maka pada tahun 2015 telah menetapkan 3 program utama yang meliputi 21 kegiatan .

A. Rencana Stratejik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011 s/d 2015 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2011 s/d 2015 .

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yaitu :

a. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah "Purbalingga Yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia.

Dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah memiliki Visi sebagai berikut : ” **Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Dinamis**”

b. Misi

Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sbb:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik,
2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan HAM.
3. Mewujudkan Manusia Purbalingga yang semakin berkualitas, berakhlak mulia, beretika, yang memiliki jatidiri serta semangat Nasionalisme, Kebersamaan dan Kegotongroyongan untuk membangun Daerah.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Purbalingga yang semakin berkualitas dan berkeadilan melalui pendayagunaan seluruh potensi Daerah.
5. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas prasarana wilayah terutama untuk mendorong keserasian pertumbuhan antar wilayah dan pemerataan pelayanan sosial.
6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Sedangkan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset daerah adalah, sebagai berikut

- Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

c. Tujuan

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , yaitu :

1. Melaksanakan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional guna mewujudkan kemampuan daerah.
2. Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk mendukung peningkatan pendapatan Daerah serta meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah.
4. Mewujudkan optimalisasi pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan pelayanan prima.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja, dengan indikator sebagai berikut :
 - Terpenuhinya kebutuhan bahan dan jasa kantor
 - Terlaksananya rapat koordinasi
 - Terpeliharanya sarana prasarana kantor
 - Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor
 - Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD
 - Terlaksananya diklat pegawai
2. Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Penetapan APBD tepat waktu
 - Perubahan APBD tepat waktu
 - Tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan APBD tepat waktu
 - Terlaksananya pelayanan keuangan terhadap SKPD
 - Terselenggaranya penyaluran dana
 - Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
 - Tersusunnya LKPD tepat waktu
 - Terkelolanya aset daerah dengan tertib
 - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah
 - Tercapainya sinkronisasi dan pemutakhiran data aset
 - Terjaminnya keamanan aset daerah
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Dengan indikator sebagai berikut :
 - Prosentase peningkatan PAD dari tahun lalu

- Tercapainya target PBB tahun 2015
- Lancarnya pengelolaan pemungutan PBB-P2
- Tersedianya data subyek obyek PBB-P2 hasil Pemutakhiran

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPPKAD Tahun 2015

Dalam rencana kinerja Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja serta terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, trampil dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan bahan dan jasa kantor - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi - Terpeliharanya sarpras kantor - Meningkatnya prosentase pemenuhan Sarpras Kantor - Meningkatnya prosentase pegawai yang sesuai persyaratan kompetensi - Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> 84 orang 105 kali 108 buah 32 jenis barang 8 orang 30 Buku
Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perda APBD tepat waktu - Penyusunan Perda APBD Perubahan tepat waktu - Tersusunnya Pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD TA 2014 tepat waktu - Terlaksananya pelayanan keuangan terhadap SKPD - Terselenggaranya penyaluran dana - Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah - Tersusunnya LKPD Th.2015 - Terkelolanya aset daerah - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang daerah - Tercapainya Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset - Terjaminnya keamanan Aset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 70 set buku 70 set buku 225 buku 176 SKPD 1.441 Kel 183 org Bendahara 230 buku 176 SKPD 176 SKPD 176 SKPD 139 bh Mobil dan 1 Pasar Segamas

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Target PAD 2015 - Tercapainya target PBB-P2 Tahun 2015 - Lancarnya pengelolaan pemungutan PBB-P2 - Tersedianya data subyek obyek PBB-P2 hasil Pemutakhiran 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>555.000 WP</p> <p>5.200 Obyek PBB-P2</p>

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015

Setelah melalui berbagai tahapan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, ternyata rencana kinerja tahunan Tahun 2015, tidak mengalami perubahan.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Kepala Daerah Tahun 2015, yaitu sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja serta terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, trampil dan profesional	1. Terpenuhinya kebutuhan bahan dan jasa kantor	84 orang	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	3.713.291.000,- 2.226.691.000,-
	2. Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi, dalam dan luar daerah	105 kali	2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	120.000.000,-
	3. Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	108 buah	3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	522.534.535,-
	4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	32 jenis	4. Pengadaan Sarpras Kantor	489.040.000,-
	5. Terlaksananya Diklat Pegawai	8 org	5. Diklat Pegawai	20.000.000,-
	6. Terlaksananya system akuntabilitas SKPD	30 buku	6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	24.666.000,-

Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah			Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.116.306.000,-
	1. Penetapan APBD tepat waktu	70 buku	1. Penyusunan APBD	290.786.000,-
	2. Penetapan APBD Perubahan tepat waktu	70 buku	2. Penyusunan Perubahan APBD	274.819.000,-
	3. Tersusunnya Pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD Thn. 2015	225 buku	3. Penyusunan Sisdur Penatausahaan Keuangan	78.387.000,-
	4. Terlaksananya pelayanan adm keuangan terhadap SKPD	176 SKPD	4. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	311.759.000,-
	5. Terselenggaranya Penyaluran dana perimbangan	1.441 Kel	5. Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan	35.326.000,-
	6. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	183 Bend	6. Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	142.633.000,-
	7. Terkelolanya Aset Daerah	176 SKPD	7. Pengelolaan Aset Daerah	202.140.000,-
	8. Tersusunnya LKPD Tahun 2015 tepat waktu	210 set buku	8. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	633.859.000,-
	9. Tercapainya Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	176 SKPD	9. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	105.000.000,-
	10 Terjaminnya keamanan Aset Daerah	139 bh Mobil & 1 Pasar	10. Pengamanan Aset	843.760.000,-
11 Tersedianya data barang milik daerah yang akurat	176 SKPD	11. Bintek Sistem Informasi Barang Daerah	197.837.000,-	

Terwujudnya kesederhanaan prosedur layanan secara mudah, lancar dan tepat sasaran			Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.528.368.000,-
	1. Tercapainya target PAD Tahun 2015	100 %	Kegiatan : 1. Intensifikasi PAD Pengelolaan Pendapatan Daerah	297.796.000,-
	2. Tercapainya realisasi pemungutan PBB-P2 Tahun 2015	239 Ds/Kel, 18 Kec	2. Percepatan Pelunasan PBB	1.002.399.000,-
	3. Lancarnya pengelolaan pemungutan PBB-P2	555.000 WP	3. Operasional Pengelolaan PBB	1.175.428.000,-
	4. Tersedianya data subyek obyek PBB-P2 hasil pemutakhiran	5.200 Obyek PBB	4. Pemutakhiran Data Obyek subyek PBB	52.745.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan untuk diproses menjadi keluaran yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2014 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hingga akhir tahun 2015 , Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mengoptimalkan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional guna mewujudkan kemampuan daerah, serta meningkatkan profesionalisme pegawai untuk memenuhi tuntutan profesionalisme guna meningkatkan pendapatan daerah

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya Analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja serta terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, trampil dan profesional	- Terpenuhinya kebutuhan bahan dan jasa kantor	84 org	86 org	102,4	100
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	105 kali	129 kali	122	87,83
	- Terpeliharanya Sarpras Kantor	108 buah	108 buah	100	100
	- Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Kantor	32 jenis	32 jenis	100	100
	- Terlaksananya Diklat Pegawai	8 orang	8 org	100	100
	- Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	30 buku	30 buku	100	100

Tujuan 2 : Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan daerah, melaksanakan penyusunan rencana APBD dan Perubahan APBD.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	- Penetapan APBD tepat waktu	70 buku	70 buku	100	100
	- Penetapan Perub.APBD tepat waktu	70 buku	70 buku	100	100
	- Tersusunnya Pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD TA 2015	225 buku	225 buku	100	100
	- Terlaksananya pelayanan keuangan terhadap SKPD	176 SKPD	181 SKPD	102	100
	- Terselenggaranya penyaluran dana	1.441 Kel	1.441 Kel	100	100
	- Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	183 Bend	183 Bend	100	100
	- Tersusunnya LKPD Th.2014 tepat waktu	230 set buku	230 set buku	100	100
	- Terkelolanya aset daerah	178 SKPD	181 SKPD	102	100
	- Tertib Adm pengel barang daerah	178 SKPD	181 SKPD	102	100
	- Tercapainya Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	178 SKPD	181 SKPD	102	100
	- Terjaminnya keamanan asset daerah	139 Mobil, 1 Pasar	139 Mobil, 1 Pasar	100	100

Tujuan 3 :Mewujudkan optimalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan pelayanan prima, serta melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 3 sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke tiga sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya kesederhanaan prosedur layanan secara mudah, lancar dan tepat sasaran	- Tercapainya Target PAD	56.437.957.000	80.014.081.333	140,86	126,01
	- Tercapainya realisasi pemungutan PBB-P2 Tahun 2014	13.800.000.000 Dari 239 Ds/Kel, 18 Kec	14.092.024.073 Dari 239 Ds/Kel, 18 Kec	102,12	101,65
	- Lancarnya pengelolaan pemungutan PBB-P2	555.000 WP	561.852 WP	101,23	100,6
	- Tersedianya data subyek obyek PBB-P2 hasil Pemutakhiran	5.200 Obyek PBB	3.419 Obyek PBB	65,75	-

B. Realisasi Anggaran

a. Sasaran-1 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya Analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan beban kerja serta terwujudnya pegawai yang berpengetahuan, trampil dan profesional	- Terpenuhinya kebutuhan bahan dan jasa kantor	84 org	86 org	102	100
	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	105 kali	129 kali	122	87,83
	- Terpeliharanya Sarpras Kantor	108 buah	108 buah	100	100
	- Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Kantor	32 jenis	32 jenis	100	100
	- Terlaksananya Diklat Pegawai	8 orang	8 orang	100	100
	- Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	30 buku	30 buku	100	100
Rata-rata capaian sasaran 1				104	97

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, dari 6 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 6 indikator kinerja dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk pencapaian sasaran-1, tidak ada halangan ataupun kendala yang dihadapi

Pencapaian kinerja **sasaran-1** Tahun 2015 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2014. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber dana yang ada.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai kebutuhan operasional
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui Diklat, Kursus, Seminar dan Study Banding.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan maksimal penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui pengiriman peserta diklat, kursus, seminar sesuai peluang penawaran yang ada.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyusunan anggaran secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi dengan memenuhi kebutuhan sarpras secara memadai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai kebutuhan.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2011-2015 sampai dengan tahun 2015, pada sasaran 1.1 telah mencapai 100 % Hal ini berarti terhadap capaian sasaran 1.1 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Sasaran - 2 :

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur pelayanan administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan bahan laporan keuangan daerah serta terkendalinya sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah	- Penetapan APBD tepat waktu	70 buku	70 buku	100	100
	- Penetapan Perub.APBD tepat waktu	70 buku	70 buku	100	100
	- Tersusunnya Pedoman pelaksanaan penatausahaan APBD TA 2014	225 buku	225 buku	100	100
	- Terlaksananya pelayanan keuangan terhadap SKPD	176 SKPD	181 SKPD	102	100
	- Terselenggaranya penyaluran dana	1.441 Kel	1.441 Kel	100	100
	- Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	183 Bend	183 Bend	100	100

- Tersusunnya LKPD Th.2014 tepat waktu	230 set buku	230 set buku	100	100
- Terkelolanya aset daerah	176 SKPD	181 SKPD	102	100
- Tertib Adm pengel barang daerah	178 SKPD	178 SKPD	100	100
- Tercapainya Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	176 SKPD	181 SKPD	102	100
- Terjaminnya keamanan asset daerah	139 mobil, 1 Pasar	139 mobil, 1 Pasar	100	100
Rata-rata capaian sasaran 2			105,5	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -2, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 12 indikator kinerja , capaiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, secara umum DPPKAD telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif dengan tetap mengupayakan hasil yang maksimal. Namun demikian terdapat 2 kegiatan yang secara target fisik selesai 100 % tetapi target keuangan tidak tercapai dan terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak mencapai 100 % baik target fisik maupun keuangannya. Penjelasan atas 5 kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2016 telah ditetapkan dalam tahun 2015, namun penggandaan dan penjilidan buku-buku tidak bisa dilakukan di tahun 2015 mengingat penetapan APBD Tahun 2016 pada tanggal 28 Desember 2015, sehingga penggandaan dan penjilidan buku-buku yang terkait APBD 2016 dimaksud akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2015.
- b. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan APBD Tahun 2016 telah ditetapkan dalam tahun 2015, namun penggandaan dan penjilidan buku-buku tidak bisa dilakukan di tahun 2015, mengingat penetapan Peraturan Bupati pada tanggal 30 Desember 2015, sehingga penggandaan dan penjilidan buku Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan APBD Tahun 2016 dimaksud akan dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2016.

Untuk pencapaian **sasaran -2** , tidak ada hambatan atau kendala yang ditemukan.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan dan terus diupayakan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun standar pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan selalu menyesuaikan dengan regulasi aturan yang berlaku.
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada semua stakeholder pengelolaan keuangan daerah, baik kepada SKPD maupun kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua lembaga terkait, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga lain dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah melalui pembinaan, diklat, seminar, kursus maupun study banding ke Pemerintah Daerah lain yang sudah lebih baik dan berpengalaman.

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2011-2015 sampai dengan tahun 2015, pada sasaran -2 telah mencapai 100% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. Sasaran- 3

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -3, Indikator kinerja, target, dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	% Capaian Tahun seblmny
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Terwujudnya kesederhanaan prosedur layanan secara mudah, lancar dan tepat sasaran	- Tercapainya Target PAD	56.437.957.000	80.014.081.333	140,86	126,01
	- Tercapainya realisasi pemungutan PBB-P2 Tahun 2014	13.800.000.000 Dari 239 Ds/Kel, 18 Kec	14.092.024.073 Dari 239 Ds/Kel, 18 Kec	102,12	101,65

	- Lancarnya pengelolaan pemungutan PBB-P2	555.000 WP	561.852 WP	101,23	100,6
	- Tersedianya data subyek obyek PBB-P2 hasil Pemutakhiran	5.200 Obyek PBB	3.419 Obyek PBB	65,75	-
Rata-rata capaian sasaran 2				102,49	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran -3, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari 3 indikator kinerja , capaiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, secara umum pengelolaan pendapatan pajak daerah melebihi target yang dianggarkan. Perlu dijelaskan bahwa dari 11 (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pengelolaan DPPKAD Kabupaten Purbalingga, terdapat 1 jenis pajak yaitu Pajak Sarang burung Walet yang dalam tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan pendapatannya karena memang tidak ada potensinya.

Perlu dijelaskan bahwa terdapat 1 kegiatan yang secara target fisik selesai 100 % tetapi target keuangan tidak tercapai . Penjelasan atas kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian **sasaran -3** , diantaranya adalah :

1. Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan Tax Dicipline sebagian wajib pajak/wajib retribusi relatif masih kurang.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah masih kurang.
3. Jumlah Pegawai/Petugas pemungut pajak belum memadai (masih kurang)
4. Data Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan potensinya.
5. SDM trampil pengelola PBB-P2 masih terbatas.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak/Retribusi untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan, kejujuran, kedisiplinan dalam membayar Pajak/retribusi.
2. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dan patuh kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengirimkan Staf potensial untuk mengikuti Diklat
4. Melakukan update atas data wajib pajak secara terus menerus agar sesuai dengan potensinya.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Memperbaharui regulasi aturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan akurasi perencanaan dan realisasi pendapatan daerah.
4. Meningkatkan tertib administrasi pendapatan daerah dan mewujudkan sistem informasi pendapatan daerah.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang proposional dan profesional
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
7. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional yang memadai.

Adapun realisasi capaian target Renstra-SKPD 2011-2015 sampai dengan tahun 2015, pada sasaran -3 telah mencapai 100% Hal ini berarti terhadap capaian sasaran -3 sesuai dari target yang telah ditetapkan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada tahun anggaran 2015, yaitu :

Target Pendapatan

Pada tahun 2015, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp.56.804.206.000, namun ternyata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 80.014.081.333,- atau dicapai sebesar 140,86 %

.Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	selisih	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah	33.946.120.000	40.708.514.171	6.762.394.171	119,92 %
2	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000	102.480.810	2.480.810	102,48 %
3	Pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan	12.008.086.000	12.306.370.791	298.284.791	102,48 %
4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	10.750.000.000	26.894.156.861	16.144.147.861	250,18 %
Jumlah		56.804.206.000	80.011.513.633	23.209.866.333	140,86 %
Capaian Tahun 2014		56.473.957.000	71.119.537.255	14.681.580.255	126,01 %
Selisih		330.249.000	23.028.339.846	8.528.206.078	14,85 %

Dari tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tugas DPPKAD Kabupaten Purbalingga melebihi target yang telah ditetapkan atau mencapai 140,86 % atau pelampauan sebesar 40,86 %. Dari 11 (sebelas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pengelolaan DPPKAD Kabupaten Purbalingga, terdapat 1 jenis Pajak yaitu Pajak Sarang Burung Walet yang dalam tahun anggaran 2015 tidak dianggarkan pendapatannya karena memang tidak ada potensinya.

c. Pelaksanaan APBD Tahun 2015

Pada tahun 2015 Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah mendapatkan Anggaran sebesar Rp 16.618.688.000,- berasal dari dana APBD, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak 13.791.559.076,- atau (83 %).

Anggaran sejumlah Rp. 16.618.688.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung (eks BAU) sebanyak Rp 7.260.723.000,- (43,69%) dan belanja langsung (BOP) sebanyak Rp.9.357.965.000,- (56,31%)

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp.7.023.867.342,- (96,74 %) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. 7.260.723.000,- sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 9.357.965.000,- direalisasikan sebesar Rp. 6.767.691.734,- (72,32 %)

Selanjutnya dilihat total realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 83 %, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung mencapai 87,77 %.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, menghimpun, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal, maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Baik, (dengan range nilai 80 – 100**, Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata dicapai (103,1 %), dengan rincian per sasaran sebagai berikut :
 - Sasaran 1 mencapai nilai 104,00 %
 - Sasaran 2 mencapai nilai 105,50 %
 - Sasaran 3 mencapai nilai 102 49 %
- b. Pencapaian target Pendapatan yang menjadi tanggung jawab DPPKAD melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak Rp. 80.014.081.333,- dari yang ditetapkan sebanyak Rp.56.804.206.000,- (140,86 %)
- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan dana (kurang) dari dana yang dianggarkan . Hal ini berarti terjadi efisiensi 17 % dari anggaran yang disediakan.

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mengelola pendapatan secara umum antara lain:

- 1) Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan Tax Dicipline sebagian Wajib Pajak / Wajib Retribusi relatif masih kurang ;
- 2) Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah masih kurang ;
- 3) Jumlah Pegawai / petugas pemungut pajak belum memadai (masih kurang)
- 4) Pemahaman oleh sebagian masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi daerah masih dianggap sebagai beban dan belum dianggap sebagai kewajiban
- 5) Data potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi riilnya;

Dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, permasalahan klasik yang muncul adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih belum efektif dan efisien. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya :

- 1). Keterbatasan SDM pengelola keuangan maupun barang yang trampil dan terlatih.
- 2). Kesadaran dan kepatuhan terhadap tanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan.
- 3) Komitmen semua pihak terhadap upaya peningkatan pengelolaan keuangan/aset daerah yang harus dibangun lebih baik lagi mulai dari unsur pimpinan sampai ke level pelaksana di semua tingkatan organisasi Pemerintah Daerah.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang Pendapatan antara lain :

- 1) Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kepatuhan , ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam membayar pajak/retribusi
- 2) Sosialisasi yang berkelanjutan tentang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dan patuh pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 3) Meningkatkan pembekalan dan memberdayakan aparat / petugas yang ada melalui pelatihan/kursus, study banding serta pembinaan lain yang bersifat pemberian motivasi kerja dan mengusulkan penambahan jumlah pegawai pemungut pajak ;
- 4) Menyusun dan mensosialisasikan Keputusan Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 973/073 tanggal 16 September 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemungutan PBB-P2.
- 5) Melakukan update atas data wajib pajak secara terus menerus agar sesuai dengan potensinya.
- 6) Melakukan upgrade program SIMPATDA dalam rangka memudahkan proses pengolahan data Pajak dan Retribusi Daerah.

Sedangkan upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. Diperlukan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar dana yang terbatas dapat dibelanjakan / dimanfaatkan untuk mendukung program yang benar-benar prioritas dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang memiliki efek multiplier tinggi serta dilakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan tingkat kebocoran pembiayaan.
2. Relatif rendahnya proporsi PAD dalam struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih sangat tinggi. Permasalahan lain adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD serta manajemen pengelolaannya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, sementara kemampuan pendanaan daerah sangat terbatas dan masih sangat tergantung dari dana perimbangan. Untuk itu daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi dan sumber-sumber keuangan daerah yang ada dengan melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung upaya atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan dan asset sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan adanya kebijakan optimalisasi/inisiatif peningkatan kapasitas

pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah yang secara umum dilakukan pada tiga tingkatan yaitu :

- a) Menyusun norma dan standar pengelolaan keuangan daerah yang secara kolektif membentuk sistem tata kelola keuangan dengan tetap menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku..
- b) Meningkatkan kapasitas organisasi yang efektif dan efisien pada unit Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa standar dan norma yang ada dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab..
- c) Meningkatkan kapasitas individual dan ketrampilan untuk menunjang tercapainya hasil yang lebih efektif dan efisien

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi kegiatan untuk upaya peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang

Sekian dan terima kasih

Purbalingga, Januari 2016
KEPALA DPPKAD
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP.19640101 198903 1 032

